

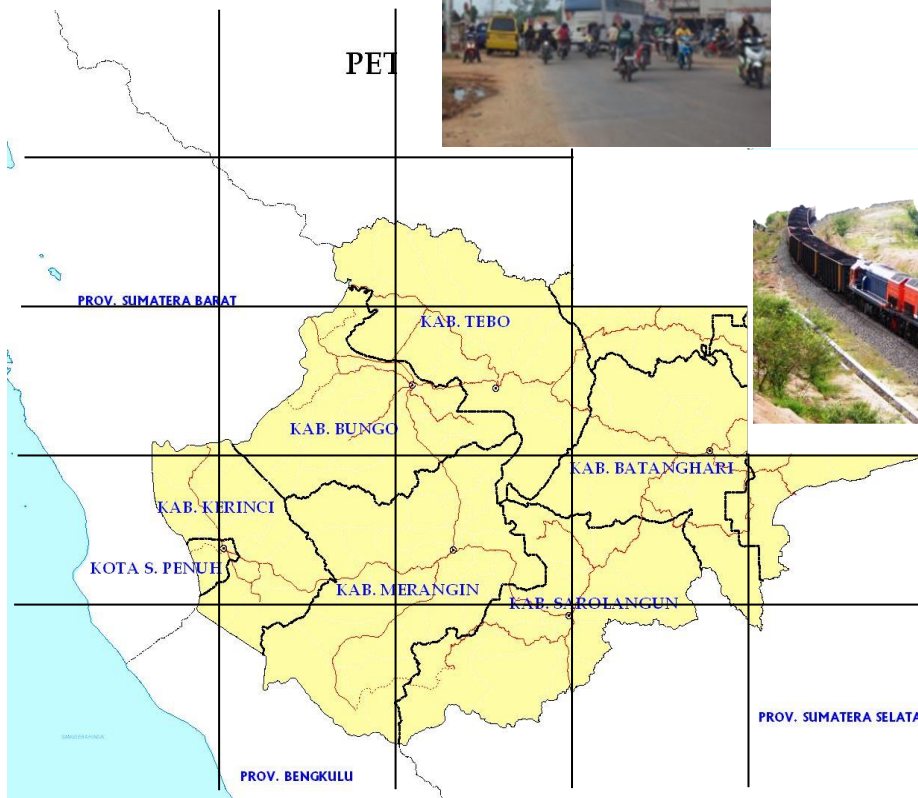


PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 76 Telp.60348 Fax. 63195
JAMBI

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2025



DATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan konsep pembangunan di sektor transportasi yang efisien dan efektif terdapat berbagai tantangan, peluang, dan kendala antara lain berupa perubahan lingkungan strategis yang dinamis baik internal maupun eksternal. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, konsep pembangunan transportasi perlu terus ditata dan disempurnakan dengan didukung sumber daya yang handal sehingga terwujud pemerataan pembangunan di sektor transportasi di wilayah Provinsi Jambi.

Sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, maupun Peraturan Presiden RI No. 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010, maka Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yang sesuai Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi memiliki tugas pokok **Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang perhubungan dan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas Otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Perhubungan.**

Bertolak dari konteks diatas, maka disusunlah Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dengan mengacu kepada prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah maupun Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Fokus utama Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi 2025 diarahkan kepada peningkatan kinerja pelayanan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan transportasi melalui penyediaan sarana/prasarana transportasi yang handal dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian. Disamping itu, kebijakan pembangunan sektor transportasi di Provinsi Jambi di dalam penyusunan Renja tahun 2025 ini adalah untuk mendorong upaya percepatan pembangunan ekonomi berkaitan dengan penetapan koridor ekonomi Pulau Sumatera (Pantai Timur Pulau Sumatera), Nawacita serta kebijakan poros maritim dunia.

Secara umum Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2025 memuat keseluruhan kebutuhan pagu anggaran di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi serta rencana program yang didasarkan kepada kebijakan dan issue strategis

yang harus diselesaikan pada tahun 2025 . Secara khusus Renja ini membahas tentang kebijakan publik sektor perhubungan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun berdasarkan penganggaran terpadu (*unified budget*) menurut klasifikasi organisasi, fungsi dan jenis belanja serta berisi kebijakan pembangunan ekonomi di bidang perhubungan, baik yang terkait dengan kebijakan APBD maupun yang diarahkan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan perhubungan.

Secara rinci RENJA Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2025 juga berisi kemajuan yang telah dicapai serta masalah dan tantangan yang akan dihadapi Sektor Perhubungan di daerah pada tahun sebelumnya. Dari perkembangan keadaan tersebut kemudian dirumuskan sasaran pembangunan yang hendak dicapai serta prioritas pembangunan yang akan ditempuh dengan mengacu pada agenda pembangunan yang perlu diselesaikan pada tahun 2025. Arah kebijakan sektor perhubungan di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yang meliputi transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara dan penunjang transportasi, selanjutnya disusun program-program pembangunan.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2025 di samping dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh jajaran Dinas Perhubungan Provinsi Jambi untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Perhubungan yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Tahun 2025, secara substansi juga sejalan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi 2021–2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 2021-2026.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAMBI**

DRS. JOHN EKA POWA. ME

Pembina Utama Madya

NIP. 196812201988101001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	5
1.1 Evaluasi Program Kegiatan 2024.....	5
1.2 Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2024	9
1.3 Permasalahan Yang Dihadapi Dan Upaya Pemecahan.....	9
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	11
1.1 Tujuan.....	11
1.2 Sasaran.....	11
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	14
BAB V PENUTUP.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2025 merupakan kelanjutan RENJA Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2025 merupakan rencana kerja awal Pemerintahan Kepala Daerah Terpilih yang disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026, serta arah kebijakan/issue-issue strategis dan prioritas yang harus diselesaikan pada Tahun 2025. Rencana Kerja 2025 ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Provinsi Jambi pada tahun 2025.

Rencana Kerja SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2025 disusun dalam kondisi masih dalam keterbatasan kemampuan keuangan yang dimiliki akibat krisis ekonomi global yang berdampak terhadap terjadinya defisit anggaran. Situasi ini menyebabkan kemungkinan tidak seluruh usulan pendanaan dapat dialokasikan.

Rencana Kerja SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2025 secara prinsip memuat kebijakan pembangunan perhubungan dan kebutuhan pagu anggaran yaitu pembangunan sektor transportasi dan kegiatan pendukungnya yang akan dibiayai melalui APBD Provinsi. Uraian ini akan diawali dengan kondisi umum yang secara singkat menguraikan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2024 dan pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2024, serta masalah dan tantangan yang kemungkinan akan dihadapi pada tahun 2025. Dari perkembangan keadaan tersebut kemudian dirumuskan prioritas-prioritas pembangunan tahun 2024 dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada masing-masing prioritas dengan mengacu kepada agenda pembangunan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yang perlu diselesaikan pada tahun 2025.

Dari perkembangan keadaan tersebut kemudian dirumuskan prioritas-prioritas pembangunan tahun 2025 dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada masing-masing prioritas dengan mengacu kepada agenda pembangunan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yang perlu diselesaikan pada tahun 2025. Prioritas pembangunan tahunan disusun dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
2. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;
3. Merupakan tugas pemerintah sebagai pelaku utama;
4. Realistis untuk dilaksanakan.

Dengan demikian RENJA Dinas Perhubungan Provinsi Jambi merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan bagian dari penyusunan APBD. Berdasarkan cakupan tersebut, RENJA Dinas Perhubungan Provinsi Jambi mempunyai fungsi pokok sebagai berikut :

1. Menjadi acuan bagi seluruh jajaran Pemangku Kepentingan Sektor Perhubungan dan lembaga-lembaga baik pemerintah maupun swasta yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Sektor Perhubungan, karena memuat seluruh kebijakan publik yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perhubungan;
2. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA SKPD sebagai bagian dalam penyusunan APBD/APBN Tahun 2025, karena memuat arah kebijakan pembangunan Sektor Perhubungan selama satu tahun;
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Dinas Perhubungan sebagai lembaga pemerintah.

Berdasarkan arah kebijakan pada masing-masing bidang pembangunan perhubungan, yang meliputi transportasi darat angkutan jalan , transportasi kereta api, transportasi laut, transportasi udara dan Penyeberangan , dan kegiatan penunjang transportasi, selanjutnya disusun program-program pembangunan yang dikaitkan dengan kebutuhan pendanaan. Dokumen RENJA Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2025 dilengkapi dengan lampiran yang berisi uraian tentang Program dan Kegiatan beserta indikasi pagu untuk masing-masing program. Kedudukan RENJA Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dalam kerangka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJPD/RPJMD) serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja OPD ini dituangkan melalui beberapa peraturan perundang – undangan, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pernerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan. Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah;
8. Peraturan Presiden No.2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (JMN) 2015-2019;
9. Peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang tahapan, tatacara penyusunan. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pernbangunan daerah mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun dokumen perencanaan tahun mendatang;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.25/2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala OPD untuk menyiapkan Renstra OPD, keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah teilih dengan JMD dan Renstra OPD. Pokokpokok isi dokumen Renstra OPD, Status hukum Renstra OPD. Renstra OPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja OPD;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 — 2026;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud utama penyusunan Rencana Keria Tahun 202 adalah agar dapat dijadikan dan pedoman dalam punyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam rangka

Penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025.

Sedangkan tujuan utama penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah :

- a. Untuk menjabarkan Rencana Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Renstra Pemerintahan Provinsi Jambi sehingga terwujudnya Tata Kolola Pemerintahan yang bersih, Trasnparan, Akuntabel dan Harmonis;
- b. Terwujudnya penjabaran prioritas pembangunan jangka menengah (JMD tahun 2021-2026)
- c. Terwujudnya integrasi, sinkronasi dab sinergitas Pembangunan;
- d. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil kegiatan

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 ini memiliki maksud dan tujuan yang Dimana untuk mejabarkan Rencana Pembinaan dan pengawasan pada tahun 2025 agar berjalan dengan lancar.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi pada Tahun 2024, telah melaksanakan sebanyak 31 Sub Kegiatan 15 Kegiatan dengan 3 Program dengan nilai pagu murni sebesar Rp. 27.895.644.766-, dan pada anggaran perubahan terdapat pengurangan (Refocushing) sebesar Rp. 853.618.653,- sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 27.060.026.113,- dengan realisasi sebesar Rp. 26.237.979.651,- atau sebesar 96,96 %.

1.1 EVALUASI PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2024

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui kegiatan rutin dan pembangunan. Kegiatan-kegiatan dimaksud dibiayai melalui dana APBD Provinsi Jambi, yang antara lain berupa program pembangunan yaitu :

1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan kegiatan :

1.1. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah

- 1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN realisasi keuangan sebesar 99,07% dari total anggaran sebesar Rp. 7.926.572.895,00
- 1.2 Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN realisasi keuangan sebesar 79,71 % dari total anggaran sebesar Rp. 124.641.604,00.

1.2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya realisasi keuangan sebesar 99,35 % dari total anggaran sebesar Rp. 295.513.150,00.
- 1.2 Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi realisasi keuangan sebesar 84,62 % dari total anggaran sebesar Rp. 6.500.000,00.

1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor realisasi keuangan sebesar 97,28 % dari total anggaran sebesar Rp. 30.268.365.00.
- 1.2 Penyediaan Peralatan Perlengkapan kantor realisasi keuangan sebesar 97,28 % dari total anggaran sebesar Rp. 147,737,650,00.

- 1.3 Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan realisasi keuangan sebesar 99,67 % dari total anggaran sebesar Rp. 207.298.600,00.
 - 1.4 Fasilitas Tamu realisasi keuangan sebesar 85,14 % dari total anggaran sebesar Rp. 196.625.200,00.
 - 1.5 Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD realisasi keuangan sebesar 99,46 % dari total anggaran sebesar Rp. 894.320.000,00.
- 1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya Air dan Listrik realisasi keuangan sebesar 88,43 % dari total anggaran sebesar Rp. 233.266.444,00
 - 1.2 Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor realisasi keuangan sebesar 99,58 % dari total anggaran sebesar Rp. 130.048.558,00
- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan realisasi keuangan sebesar 97,34 % dari total anggaran sebesar Rp. 759.670.000,00.
 - 1.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya realisasi keuangan sebesar 99,72 % dari total anggaran sebesar Rp187.97.000,00
 - 1.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya sebesar 99,91 % dari total anggaran sebesar Rp. 152.064.000,00
 - 1.4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar 83,97 % dari total anggaran sebesar Rp. 519.475.600,-
 - 1.5 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sebesar 99,95 % dari total anggaran sebesar Rp. 76.430.000,-
 - 1.6 Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya sebesar 99,26 % dari total anggaran sebesar Rp. 5.62.910.000,-

Secara keseluruhan outcome dari kegiatan-kegiatan diatas adalah meningkatkan kenyamanan, kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas-tugas operasional serta Peningkatan Disiplin Aparatur.

2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

2.1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi

2.1.1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi sebesar 98.94 % dari total anggaran sebesar Rp. 303.743.000,00

2.1.2. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan Transportasi realisasi keuangan sebesar 99.49 % dari total anggaran sebesar Rp. 649.600.176,00

2.2. Penyediaan perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

2.2.1. Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Provinsi realisasi keuangan sebesar 99.42 % dari total anggaran sebesar Rp. 334.795.150,-

2.2.2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan perlengkapan jalan realisasi keuangan sebesar 88,86 %

2.2. Pengelolaan Terminal Type B

2.2.1. Peningkatan kapasitas SDM Pengelola terminal type B realisasi keuangan sebesar 88.64 % dari total anggaran sebesar Rp. 999.653.379,00

2.3. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi

2.3.1. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Provinsi realisasi keuangan sebesar 99.37% dari total anggaran sebesar Rp. 134.299.140,00

2.4. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

2.4.1. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor provinsi realisasi keuangan sebesar 92,88 % dari total anggaran sebesar Rp. 115.172.746,00

2.5. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2.5.1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi realisasi keuangan sebesar 89,33 % dari total anggaran sebesar Rp. 2.257.864.931,00

2.5.2. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi realisasi keuangan sebesar 99,18 % dari total anggaran sebesar Rp. 252.625.995,00

2.6. Penerbitan Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi

2.6.1. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek kewenangan Provinsi realisasi keuangan 98,64 % dari total anggaran sebesar Rp. 588.187.000,00

2.7. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional

2.7.1. Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah lingkungan kerja (DLKAR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional realisasi keuangan sebesar 99,38 % dari total anggaran sebesar Rp. 316.920.000,00

AKUNTABILITAS KEUANGAN

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA DANA (Rp)	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.542.434.996	17.24.468.631	317.966.365	
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	11.448.71.762	8.118.371.80	3.330.349.942	
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	905.107.000	895.139.200	9.967.800	
	TOTAL	30.171.291.611	27.119.744.353	3.051.547.250	

1.2 PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2024

Pada tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Jambi memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 16.315.409.229,- yang digunakan untuk melaksanakan 3 Program dan 12 kegiatan dan 18 Sub Kegiatan. Program kegiatan Tahun 2024 pada saat Rancangan Kerja Tahun 2025 ini disusun masih dalam tahap pelaksanaan, pelelangan maupun persiapan.

1.3 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA PEMECAHANNYA

Beberapa identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh OPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Urusan Bidang Perhubungan

a. Permasalahan Transportasi Darat;

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya penyelenggaraan transportasi darat tidak terlepas dengan jaringan prasarana jalan yang ada. Dimana rata-rata kualitas jalan di Provinsi Jambi dengan kapasitas MST 8 – 10 Ton, sementara angkutan barang yang melintas di jalan umum masih ada yang melebihi kapasitas yang ada. Beberapa identifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan transportasi darat diantaranya :

- 1) Belum selesainya pembangunan jalan khusus untuk angkutan batubara, sehingga sangat mengganggu kinerja pelayanan jalan umum;
- 2) Fasilitas perlengkapan jalan belum bisa memenuhi target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perhubungan;
- 3) Masih belum optimalnya pelayanan beberapa terminal;
- 4) Pelanggaran terhadap kelebihan muatan;
- 5) Belum optimalnya kinerja angkutan umum;
- 6) Beberapa daerah terpencil belum tersentuh angkutan umum;
- 7) Beberapa trayek angkutan umum masih perlu subsidi pemerintah;

b. Permasalahan Transportasi SDP;

Untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan atau disingkat SDP beberapa permasalahan dalam penyelenggaraannya diantaranya :

- 1) Minimnya jumlah pegawai yang berkompetensi dalam bidang penyelenggaraan sungai, danau dan penyeberangan;

- 2) Beberapa wilayah di Jambi adalah perairan, sehingga perlu pengembangan dan peningkatan fasilitas Sarana dan Prasarana yang berkeselamatan;
 - 3) Fasilitas pelabuhan penyeberangan Ro-Ro Kuala Tungkal masih minim perlu pengembangan;
 - 4) Rendahnya pemahaman keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan sungai;
- c. Permasalahan Transportasi Laut;
- 1) Belum selesainya Pembangunan Pelabuhan Laut Ujung Jabung;
 - 2) Kendala alur pelayaran yang sempit dan dangkal sehingga kapasitas dan data dukung pelabuhan yang rendah;
- e. Permasalahan Transportasi Udara;
- 1) Keterbatasan rute penerbangan;
 - 2) Pengembangan Bandara belum optimal sesuai harapan.
- f. Permasalahan Transportasi Perkotaan;
- 1) Kebijakan penataan transportasi perkotaan masih dibatasi dengan pengembangan transportasi masing-masing wilayah perkotaan di Kabupaten/Kota (belum terintegrasi);

Upaya Pemecahan dari permasalahan yang ada yaitu :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan personil Dinas Perhubungan Provinsi Jambi melalui pelatihan, diklat maupun kursus.
2. Melakukan efisiensi penggunaan dana yang ada dengan membuat skala prioritas yang bertujuan agar program-program yang dianggap strategis dapat terlaksana dengan baik.
3. Mengusulkan secara berkelanjutan kegiatan perencanaan dilingkungan perhubungan.
4. Mendukung upaya program Zero overload dan Zero accident.
5. Mengupayakan peningkatan dana yang bersumber dari APBN Kementerian Perhubungan serta menyiapkan lebih dini dan lengkap dokumen-dokumen dan data dukung usulan pembangunan.
6. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dengan BUMN sektor perhubungan guna mengalokasikan dana yang lebih besar lagi dalam peningkatan/ pengembangan bandar udara dan pelabuhan yang ada di Provinsi Jambi.
7. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota guna memperoleh sinergisitas dan integrasi pembangunan sektor perhubungan di Provinsi Jambi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Untuk lebih mempertajam dalam mewujudkan arah dan kebijakan Sektor Perhubungan di Provinsi Jambi, maka ditetapkan Tujuan Strategis dan Sasaran yaitu :

1.1 Tujuan Strategis

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan dirumuskannya tujuan Strategis ini, maka Dinas Perhubungan akan dapat secara cepat dan tepat mengetahui apa yang harus dilakukan oleh organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Perumusan tujuan Strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Perhubungan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai. Untuk mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai visi dan misi yang ditetapkan, maka setiap tujuan Strategis yang ditetapkan harus memiliki sasaran dan indikator kinerja (performance indicator) yang dapat diukur.

Tujuan Strategis dari Dinas Perhubungan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana, fasilitas keselamatan dan perencanaan transportasi;
- Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan dan operasional transportasi yang aman, nyaman, lancar, tertib, teratur, andal, selamat, terjangkau, efektif dan efisien.
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapabilitas sumber daya manusia menuju clean government dan good governance.
- Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana perhubungan.

1.2 Sasaran

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan dan memiliki indikator kinerja yang dapat diukur. Sasaran Strategis ini menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan, melalui serangkaian kegiatan dan akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kerja (Performance Plan).

Penetapan sasaran Strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran-sasaran Strategis yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan Strategis yang terkait. Oleh karena itu apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai maka diharapkan tujuan Strategis terkait juga akan dapat dicapai.

Pencapaian sasaran Strategis ini merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Perhubungan, karena sasaran Strategis merupakan bagian integral dari proses perencanaan Strategis yang sifatnya menyeluruh.

Selanjutnya untuk masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Seperti halnya sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan juga seluruhnya mendukung terhadap pencapaian sasaran yang terkait. Secara keseluruhan sasaran dan program Dinas Perhubungan dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan 1 :

“Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapabilitas sumber daya manusia menuju clean government dan good governance”.

Sasaran strategis dan program untuk mewujudkan tujuan ini adalah :

Sasaran	Program
1 Meningkatkan akuntabilitas kelembagaan yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing.	1 Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tujuan 2 :

“Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana, prasarana, fasilitas keselamatan dan perencanaan transportasi”.

Sasaran Strategis dan programnya adalah :

Sasaran	Program
1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi.	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 2. Program Pengelolaan Pelayaran 3. Program Pengelolaan Perkeretaapian

Tujuan 3 :

“Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana perhubungan”.

Sasaran Strategis dan programnya adalah :

Sasaran	Program
1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi.	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 2. Program Pengelolaan Pelayaran 3. Program Pengelolaan Perkeretaapian

Tujuan 4 :

“Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan operasional transportasi yang aman, nyaman, lancar, tertib, teratur, handal, selamat, terjangkau, efektif dan efisien”.

Sasaran Strategis dan Programnya adalah :

Sasaran	Program
1. Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi yang efektif, efisien dan taat aturan.	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
2. Meningkatnya pelayanan jasa angkutan.	2. Program Pengelolaan Pelayaran Laut , Sungai dan danau

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Didalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program dengan kata lain kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan merupakan aspek operasional dari suatu rencana Strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Program dan kegiatan pada masing-masing tujuan strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut :

Indikator program, kegiatan, target dan capaian serta usulan pagu indikatif program kegiatan untuk Tahun 2024 secara rinci disampaikan pada Tabel dibawah ini :

Capaian Indikator Kinerja daerah Dinas perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya konektivitas Nasional, regional dan Lokal.	Rasio Konektivitas Pelayanan Angkutan	54	54,05	100,09 %
2.	Meningkatnya kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Kinerja Lalu Lintas Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	0,55	0,55	100 %
3.	Meningkatnya keselamatan Transportasi	Rasio Penyediaan fasilitas keselamatan transportasi.	75	71,43	95,24 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan angkutan	75.2	77,26	102,74 %

Target Indikator Kinerja Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2025

No	Sasaran Staregis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan					Target Akhir Renstra
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya konektivitas nasional, regional dan local	Rasio konektivitas pelayanan Angkutan	Persen	53,7	53,9	54	54,1	54,2	54,4
2.	Meningkatnya kinerja Lalu Lintas dan angkutan Jalan	Kinerja Lalu Lintas	Nilai	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	67	70	72	75	76	77
3.	Meningkatnya keselamatan transportasi	Rasio Penyediaan fasilitas keselamatan transportasi	Persen	37	60	75	80	90	95
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan angkutan	Indeks	62,32	75	75,2	75,6	77,2	80

No.	Program dan Kegiatan dan Subkegiatan
<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p>	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <p>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 2. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 3. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B 4. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 5. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 6. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 7. Kegiatan Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi <p>Program Pengelolaan Pelayaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek Antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam daerah Provinsi Yang Bersangkutan 2. Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan pengumpan Regional

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2025 merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari sebagian Rencana Strategis 2021 – 2026 serta program kebijakan dan issue-isue strategis pada masa transisi Kepala Daerah, secara detail memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dalam tahun 2025, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi merencanakan 33 kegiatan dalam 3 program untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dari APBD.

Sebagaimana dengan tahun-tahun sebelumnya, bahwa program dan kegiatan dilingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi pada tahun 2025 hanya melaksanakan program kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD).

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	
1				2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	07	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi								
1	07	01	1,01	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Tersusunna rencana penganggaran dan dokumen perangkat daerah							800
1	15	01	1,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketertiban dan disiplin aparatur dalam menjalankan tugas	Kota Jambi	80%	10.400.000	APBD		80%	10.400.000
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.900.000	APBD			9.900.000
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				500.000	APBD			500.000
1	15	01	1,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya aparatur yang kompeten dalam bidang perhubungan dan meningkatnya kemampuan kinerja pegawai	Kota Jambi	80%	1.200.000	APBD		80%	1.200.000
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				800.000	APBD			800.000
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				400.000	APBD			400.000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	
1	15	01	1,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelancaran dan kenyamanan tugas aparatur	Kota Jambi	80%	1.300.000	APBD		80%	1.300.000
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000	APBD			50.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.000	APBD			200.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				250.000	APBD			250.000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				60.000	APBD			60.000
				Fasilitasi Kunjungan Tamu				150.000	APBD			150.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				590.000	APBD			590.000
1	15	01	1,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Provinsi Jambi	80%	2.250.000	APBD		80%	2.650.000
				Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				800.000	APBD			1.200.000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				650.000	APBD			650.000
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				300.000	APBD			300.000
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				300.000	APBD			300.000
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000	APBD			200.000
				- Pengadaan Lahan Untuk Kantong Parkir								
1	15	01	1,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya tata kelola pelayanan perkantoran yang tertib administrasi	Kota Jambi	80%	900.000	APBD		80%	900.000
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50.000	APBD			50.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				400.000	APBD			400.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				450.000	APBD			450.000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	15	01	1,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi dan tersedianya sarana-prasarana pendukung pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan publik	Kota Jambi	80%	2.400.000	APBD		80%	2.500.000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				700.000	APBD			700.000
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				200.000	APBD			200.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.500.000				1.600.000
2	15	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								
2	15	02	1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Meningkatnya kualitas, perencanaan teknis dan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Provinsi Jambi	90%	3.155.000	APBD		95%	2.800.000
				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		Provinsi Jambi		2.405.000	APBD			2.030.000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				- Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi Jambi			0%	0	APBD		0%	0
				- Survei Lalu Lintas Harian Jalan Provinsi			1 Lap.	375.000	APBD		1 Lap.	375.000
				- Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat			1 Lap.	100.000	APBD		1 Lap.	100.000
				- Penyusunan Tatrawil				860.000	APBD		0%	0
				- Penyusunan Jaringan trayek dan jaringan lintas			0%	0	APBD		0%	0
				- Penyusunan Kajian Daerah Rawan Kecelakaan			0%	0	APBD		1 Lap.	775.000
				- Survei Load Faktor/Kinerja sarana angkutan jalan Provinsi Jambi			0%	0	APBD		1 Lap.	580.000
				- Penyusunan FS Terminal Terpadu			0%	0	APBD		0%	0

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				- Survei Kebutuhan Perlengkapan Jalan Provinsi				200.000	APBD			200.000
				- Penyusunan DED Terminal Terpadu			1 Lap.	870.000	APBD		0%	0
				- Penyusunan FS lokasi pembangunan Dry port (Terminal Antara Angkutan Barang)			0%	0	APBD		1 Lap.	540.000
				- Penyusunan DED Dry port			0%	0	APBD		0%	0
				Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		Provinsi Jambi		150.000	APBD			150.000
				- Sosialisasi peraturan dan kebijakan					APBD			
p				Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		Provinsi Jambi		150.000	APBD			150.000
				- Monitoring dan Evaluasi					APBD			

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi			2 Kali	450.000	APBD		2 Kali	470.000
2	15	03	1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Tersedianya perlengkapan Jalan, prasarana keselamatan jalan yang sesuai dengan persyaratan teknis dan berfungsi fasilitas keselamatan jalan dengan baik.	Provinsi Jambi	80%	14.452.759	APBD		85%	14.761.059
				Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	Tersedianya prasarana keselamatan jalan.	Provinsi Jambi		1.762.000	APBD			1.762.000
				- Pembangunan kawasan tertib lalu lintas			1 lokasi	450.000	APBD		1 lokasi	450.000
				- Pembangunan pedestrian area			1 lokasi	500.000	APBD		1 lokasi	500.000
				- Pembuatan Zona Selamat Sekolah			2 lokasi	772.000	APBD		2 lokasi	772.000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				- Pembuatan lajur sepeda			2 lokasi	490.000	APBD		2 lokasi	490.000
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Tersedianya perlengkapan jalan berupa rambu- rambu, marka jalan, pagar pengaman jalan, delineator, paku jalan, cermin tikungan, LPJU, Warning light, traffic light/ATCS	Provinsi Jambi		11.925.759	APBD			11.939.059
				- Pemasangan rambu lalu lintas 508 Unit		Provinsi Jambi	645	983.285	APBD		645	983.285
				- Pembuatan marka jalan, pita pengaduh dan marka karpet 28000 m		Provinsi Jambi	68955	2.413.442	APBD		68955	2.413.442
				- Pemasangan pagar pengaman jalan (Guardrail)		Provinsi Jambi					0	-
				- Pemasangan Rambu Tipe F (16 Unit)		Provinsi Jambi	161	2.481.111	APBD		161	2.481.111

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				- Pemasangan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ) (27 Unit)		Provinsi Jambi	13	188.695	APBD		13	188.695
				- Pemasangan Delineator (735 Unit)		Provinsi Jambi	1329	990.254	APBD		1329	990.254
				- Pemasangan Paku Jalan (1200 Unit)		Provinsi Jambi	3520	968.000	APBD		3520	968.000
				- Pemasangan Cermin tikungan		Provinsi Jambi	23	159.114	APBD		23	70.614
				- Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU). (50 Unit)		Provinsi Jambi	40	1.590.000	APBD		40	1.590.000
				- Pemasangan warning light		Provinsi Jambi	6	351.858	APBD		6	353.658
				- Pemasangan ATCS / Alat pengendali dan pemantau lalu lintas berbasis online (10 Unit)		Provinsi Jambi	3	1.800.000	APBD		4	1.800.000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		Provinsi Jambi	20%	405.000	APBD		20%	540.000
				- Rehab/pemeliharaan fasilitas keselamatan prasarana jalan								
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Provinsi Jambi	20%	360.000	APBD		20%	520.000
				- Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan.								180.000
2	15	04	1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Terpenuhinya SPM Pelayanan dan operasional Terminal Tipe B	Kota Jambi dan Tanjung Barat	85%	4.000.000	APBD		85%	5.000.000
				Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan terminal		0%	-				-

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				- Penyusunan DED Pembangunan terminal dan fasilitasnya								
				Pembangunan Gedung Terminal	Terbangunnya gedung terminal	Kota Jambi dan Tanjung Barat		1.500.000	APBD			2.500.000
				- Pembangunan terminal tipe B								
				Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang terminal	Kota Jambi dan Tanjung Barat		500.000	APBD			500.000
				- Pengadaan fasilitas penunjang terminal	Pengadaan Portal Terminal (4 Terminal)	Kota Jambi dan Tanjung Barat						200.000.000
					Pengadaan Lampu PJU (20 Unit)	Kota Jambi dan Tanjung Barat						200.000.000
					Instalasi Listrik Terminal type B (Pulau Kembang)	Kota Jambi						1.000.000
					Pengadaan Kendaraan Operasional (Roda 4)/ 2 Unit	Kota Jambi						500.000.000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
					Pengadaan Kendaraan Operasional (Roda 2)/ 7Unit							
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal	Terlaksananya pemeliharaan terminal dan pemenuhan standar pelayanan.	Kota Jambi dan Tanjung Barat		1.000.000	APBD			1.000.000
				- Rehab dan pemeliharaan terminal penumpang tipe B	Rehab Terminal Tipe B (15 Kios)	Kota Jambi						200.000.000
				Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	Meningkatnya kompetensi dan penyelenggaraan operasional terminal	Kota Jambi dan Tanjung Barat		1.000.000	APBD			1.000.000
				- Peningkatan kesejahteraan, kompetensi dan sumber daya SDM terminal.								
				- Peningkatan kesejahteraan, kompetensi dan sumber daya SDM Pengelola terminal.								
2	15	05	1.04	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Provinsi Jambi	35%	1.550.000	APBD		40%	750.000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi		Provinsi Jambi		300.000	APBD			300.000
				- Manajemen rekayasa dan pengendalian lalu lintas di jalan provinsi								
				Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		Provinsi Jambi		200.000	APBD			200.000
				- Pengadaan perlengkapan jalan portable dalam rangka manajemen dan rekayasa lau lintas								
				Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		Provinsi Jambi		150.000	APBD			150.000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				- Sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas								
				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi		Provinsi Jambi		900.000	APBD			100.000
				- Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas (Timbangan Portable)								
				Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Untuk Jaringan Jalan Provinsi								
				Pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi								150.000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
2	15	06	1.05	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Terpenuhinya Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Provinsi Jambi	80%	550.000	APBD		90%	650.000
				Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin		Provinsi Jambi		100.000	APBD			100.000
				- Fasilitasi dan perumusan kebijakan tata kelola Andalalin					APBD		1 Paket	150.000
				Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin		Provinsi Jambi		250.000	APBD			250.000
				- Peningkatan kompetensi dan pelatihan penilai Andalalin								
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		Provinsi Jambi		100.000	APBD			125.000
				- Koordinasi dan sinkronisasi penilaian Andalalin								
				Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin		Provinsi Jambi		100.000	APBD			175.000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				- Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Andalalin								
2	15	07	1.06	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Terlaksananya kegiatan inspeksi, pengawasan, pemantauan dan Uji Petik Kendaraan Bermotor di Jalan	Provinsi Jambi	90%	1.125.000	APBD		90%	1.150.000
				Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ		Provinsi Jambi		300.000	APBD			300.000
				- Pendidikan dan pelatihan auditor dan inspektur LLAJ								
				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor		Provinsi Jambi		150.000	APBD			150.000
				- Monitoring dan evaluasi operasional pengujian kendaraan bermotor								
				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal		Provinsi Jambi		150.000	APBD			150.000
				- Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan operasional terminal								

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor provinsi	Terpilihnya awak kendaraan umum dan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas tingkat provinsi	Provinsi Jambi		325.000	APBD			350.000
				- Pemilihan abdiyasa (awak kendaraan umum) terladan dan pelajar pelopor tingkat provinsi.								
				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Tersedianya sistem informasi dan manajemen keselamatan dan terpenuhinya standar keselamatan angkutan umum	Provinsi Jambi		200.000	APBD			200.000
				- Penyusunan sistem informasi pemantauan keselamatan angkutan umum								
				- Monitoring dan evaluasi operasional angkutan umum								

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
2	15	08	1.07	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Angkutan Umum Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang berkeselamatan	Provinsi Jambi	80%	5.600.000	APBD		85%	5.965.000
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				4.685.000	APBD			5.000.000
				- Subsidi operasional BRT Trans Siginjai								
				Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi		Provinsi Jambi		915.000	APBD			965.000
				- Sewa mobilitas darat untuk menunjang operasional embarkasi haji antara								

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				- Penyelenggaraan, Pengendalian dan pengaturan pelaksanaan operasional angkutan lebaran, natal dan tahun baru								
2	15	09	1.08	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan Antar Kota Antar Kabupaten	Provinsi Jambi	65%	472.000	APBD		70%	751.000
				Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi				472.000	APBD			751.000
				- Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BRT			1 Lap.	97.000	APBD		1 Lap.	97.000
				- Penyusunan FS dan masterplan pembangunan sarana angkutan umum massal aglomerasi			1 Lap.	375.000	APBD		0%	-
				- Penyusunan DED pembangunan sarana angkutan umum massal aglomerasi			0%	-			1 Lap.	654.000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				- Kajian peningkatan standar pelayanan angkutan umum.				-			0%	-
				Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi		Provinsi Jambi		250.000	APBD			250.000
				- Fasilitasi penerapan kebijakan penyusunan angkutan aglomerasi								
2	15	10	1.09	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota Antar Kabupaten	Provinsi Jambi	75%	250.000	APBD		80%	710.000
				Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi		Provinsi Jambi	0%	-			1 Lap.	460.000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	
				- Penyusunan rencana umum jaringan trayek dan jaringan lintas provinsi								
				Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi		Provinsi Jambi	1 Paket	250.000	APBD		1 Paket	250.000
				- Fasilitasi kebijakan penerapan jaringan trayek dan jaringan lintas provinsi								
2	15	11	1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Antar Kabupaten	Provinsi Jambi	35%	600.000	APBD		40%	600.000
				Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi		Provinsi Jambi	0%	-			0%	-

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				- Penyusunan kajian Rencana umum jaringan trayek perdesaan dan keperintisan			0%	-			0%	-
				Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi		Provinsi Jambi	0%	600.000	APBD		0%	600.000
				- Fasilitasi penerapan kebijakan penetapan jaringan trayek perdesaan dan keperintisan			0%	-			0%	-
				- Subsidi trayek angkutan keperintisan.			1 Paket	600.000	APBD		1 Paket	600.000
2	15	12	1.11	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Antar Kabupaten	Provinsi Jambi	25%	500.000	APBD		30%	500.000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi		Provinsi Jambi		300.000	APBD			300.000
				- Penyusunan studi kebutuhan angkutan umum tidak dalam trayek.								
				Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi				200.000	APBD			200.000
				- Fasilitasi dan penetapan kebijakan operasional angkutan umum tidak dalam trayek.								

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
2	15	13	1.12	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terpenuhinya Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Jambi	25%	400.000	APBD		30%	400.000
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Provinsi Jambi		200.000	APBD			200.000
				- Verifikasi pemenuhan persyaratan perijinan angkutan umum dalam trayek								

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan ProvinsiTaksi yang Wilayah Operasinya KewenanganProvinsi		Provinsi Jambi		200.000	APBD			200.000
				- Fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perijinan								
2	15	14	1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terpenuhinya Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Jambi	25%	400.000	APBD		30%	400.000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Provinsi Jambi		200.000	APBD			200.000
				Verifikasi pemenuhan persyaratan perijinan angkutan umum tidak dalam trayek		Provinsi Jambi						
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi		Provinsi Jambi		200.000	APBD			200.000
				- Fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perijinan								

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
2	15	15	1.14	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Jambi	85%	600.000	APBD		85%	675.000
				Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi		Provinsi Jambi		-				-
				- Penyusunan kajian pentarifan angkutan umum di jalan.								
				Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi		Provinsi Jambi		350.000	APBD			400.000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				- Penyusunan data dan informasi angkutan								
				Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Angkutan Lebaran ,Natal dan Angkutan Kegiatan Haji	Provinsi Jambi	100%	250.000	APBD			1.000.000
				- Monitoring, evaluasi dan pengawasan.								
2	15	3		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN								
2	15	03	1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Terpenuhinya Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Jambi	25%	300.000	APBD		30%	300.000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Provinsi Jambi		200.000	APBD			200.000
				- Verifikasi pemenuhan persyaratan perijinan angkutan laut.								
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi		Provinsi Jambi		100.000	APBD			100.000
				- Fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan perijinan angkutan laut.								

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
2	15	03	1.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Terpenuhinya zin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Provinsi Jambi	25%	100.000	APBD		30%	150.000
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Provinsi Jambi		100.000	APBD			100.000
				- Verifikasi pemenuhan persyaratan perijinan angkutan pelayaran rakyat.								
2	15	03	1.03	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Terpenuhinya Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Provinsi Jambi	25%	300.000	APBD		30%	300.000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Provinsi Jambi		200.000	APBD			200.000
				- Verifikasi pemenuhan persyaratan perijinan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.								
				- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawssn Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang melayani Trayek Kewenangan Provinsi Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau							100%	733.600
				- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Perairan							100%	80.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi		Provinsi Jambi		100.000	APBD			100.000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				- Fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan perijinan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.								
2	15	03	1.04	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Terwujudnya jaringan Lintas Penyeberangan dan sertifikasi kapal dalam daerah Provinsi Jambi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Provinsi Jambi	20%	300.000	APBD		25%	300.000
				Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi		Provinsi Jambi	20%	300.000	APBD		25%	300.000
				- Survei, pendataan, penetapan jaringan lintas penyeberangan dan pengoperasian kapal sungai.								

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
2	15	03	1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terwujudnya Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Jambi	20%	500.000	APBD		25%	500.000
				Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi		Provinsi Jambi		300.000	APBD			300.000
				- Survei, pendataan, penetapan jaringan lintas penyeberangan dan pengoperasian kapal penyeberangan.								
				Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi		Provinsi Jambi		200.000	APBD			200.000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				- Monitoring, pengawasan dan pengendalian operasional angkutan sungai dan penyeberangan.								
2	15	03	1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Terpenuhinya Perizinan Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Provinsi Jambi	20%	500.000	APBD		100%	340.000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Provinsi Jambi		300.000	APBD		100%	300.000
				- Verifikasi dan survai persyaratan perijinan ijin usaha di bidang angkutan laut.		Provinsi Jambi			APBD			280.000
				- Konsultan Independen								120.000
				- Penyusunan Laporan								20.000
				- Operarional Survey								140.000
				Fasilitas, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan perizinan transportasi perairan (FGD)		Provinsi Jambi			APBD		100%	60.000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas		Provinsi Jambi		200.000	APBD		100%	200.000
2	15	03	1.07	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Terwujudnya Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Provinsi Jambi	20%	475.000	APBD		25%	275.000
				Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota		Provinsi Jambi		200.000	APBD			-

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	
				- Penyusunan kajian penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi provinsi.								
				Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota		Provinsi Jambi		200.000	APBD			200.000
				- Penyusunan data dan informasi angkutan penyeberangan kelas ekonomi.								
				Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota		Provinsi Jambi		75.000	APBD			75.000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				- Monitoring, pengawasan dan pengendalian operasional angkutan penyeberangan provinsi.								
2	15	03	1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Tersediannya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Provinsi Jambi	85%	2.350.000	APBD		85%	2.350.000
				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/DaerahLingkungan Kepentingan (DLKP) PelabuhanPengumpan Regional		Provinsi Jambi		1.900.000	APBD			1.900.000
				- Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Jambi								

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				- Penyusunan DLKr dan DLKp Pelabuhan Nipah Panjang.								
				- Penyusunan DLKr dan DLKp Pelabuhan Mendahara				450.000	APBD			
				- Penyusunan DLKr dan DLKp Pelabuhan Kuala Tungkal.								450.000
				Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		Provinsi Jambi		200.000	APBD			200.000
				- Fasilitasi dan sosialisasi kebijakan penetapan rencana induk, DLKr dan DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional.								

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		Provinsi Jambi		400.000	APBD			400.000
				- Monitoring, evaluasi dan pengendalian penetapan rencana induk, DLKr dan DLKp Pelabuhan pengumpan regional.								
2	15	03	1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Terbangunnya dan Terpeliharanya serta beroperasinya Pelabuhan Pengumpan Regional	Provinsi Jambi	40%	1.840.000	APBD		100%	1.350.000
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Pembangunan dan Pengumpan Regional		Provinsi Jambi		1.140.000	APBD		0%	600.000
				- Penyusunan FS Pelabuhan Pengumpan Regional			0%	-				-

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				- Penyusunan DED Pelabuhan Pengumpan Regional				940.000	APBD			-
				- Review Desain Dermaga Pelabuhan Ujung Jabung			0%	-			0%	-
				- Penyusunan AMDAL pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional			1 Lap.	200.000	APBD		1 Lap.	600.000
				- Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional								
				Peme;iharaan Pelabuhan pengumpan Regional								
				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional		Provinsi Jambi		500.000	APBD		100%	300.000
				- Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi Jambi							100%	450.000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				-Operasional penyelenggaraan Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Regional								300.000
				Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		Provinsi Jambi		200.000	APBD			200.000
				- Monitoring, evaluasi dan pengendalian operasional pelabuhan pengumpan regional								
				-DED Halte Sungai/Dermaga							4Lap	400.000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	
2	15	03	1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terbangun dan terwujudnya Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Jambi	25%	4.280.000	APBD		30%	6.500.000
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Provinsi Jambi		1.480.000	APBD			1.050.000
				- Verifikasi dan survai pendataan perijinan pembangunan pelabuhan sungai.				100.000	APBD			100.000
				- Penyusunan FS dan masterplan pembangunan pelabuhan sungai			1 Lap.	780.000	APBD			

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				- Penyusunan DED pembangunan halte/pelabuhan sungai.				500.000	APBD			500.000
				-Pembangunan Fasilitas Dermaga Angso Duo							100%	200.000
				-Pemeliharaan Kolam Pelabuhan Dermaga Angso Duo							100%	450.000
				-DLKP/DLKR Dermaga Angso Duo							100%	400.000
				Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Provinsi Jambi		2.000.000				5.000.000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	
				- Pembangunan halte/dermaga / Pelabuhan Sungai di Provinsi Jambi				2.000.000				5.000.000
				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Provinsi Jambi		500.000	APBD			500.000
				- Pemeliharaan halte/dermaga / pelabuhan sungai								

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Provinsi Jambi		300.000	APBD			300.000
2	15	03	1.11	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Terpenuhinya Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Provinsi Jambi	40%	450.000	APBD		45%	450.000
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Provinsi Jambi		200.000	APBD			200.000
				- Survei, kajian, pendataan dan verifikasi persyaratan perijinan badan usaha di pelabuhan pengumpan regional								

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional		Provinsi Jambi		250.000	APBD			250.000
				- Koordinasi, sinkronisasi dan monitoring pelaksanaan perijinan badan usaha di pelabuhan pengumpan regional								
2	15	03	1.12	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional	Terpenuhinya Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan engumpan Regional	Provinsi Jambi	25%	300.000	APBD		30%	300.000
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Provinsi Jambi		150.000	APBD			150.000
				- Penyusunan DED Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional								

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				- Survei, pendataan dan verifikasi persyaratan pengembangan pelabuhan pengumpan regional								
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional		Provinsi Jambi		150.000	APBD			150.000
				- Fasilitasi, monitoring, sinkronisasi dan koordinasi pengembangan pelabuhan pengumpan regional								
2	15	03	1.13	Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksanaya Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Provinsi Jambi	25%	300.000	APBD		30%	300.000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Provinsi Jambi		150.000	APBD			150.000
				- Survei, pendataan dan verifikasi persyaratan perijinan operasional pelabuhan pengumpan regional								
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional		Provinsi Jambi		150.000	APBD			150.000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				- Fasilitasi, monitoring, sinkronisasi dan koordinasi operasional pelabuhan pengumpan regional								
2	15	03	1.14	Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Terpenuhinya Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Provinsi Jambi	25%	300.000	APBD		30%	300.000
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Provinsi Jambi		150.000	APBD			150.000
				- Penyusunan kajian pengerukan perairan di wilayah pelabuhan pengumpan regional								

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				- Survei, pendataan dan verifikasi persyaratan perijinan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional								
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional		Provinsi Jambi		150.000	APBD			150.000
				- Fasilitasi, monitoring, sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan ijin pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional								
2	15	03	1.15	Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Terpenuhinya Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Provinsi Jambi	25%	300.000	APBD		30%	300.000
				Fasilitasi Pemenuhan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Perizinan Elektronik		Provinsi Jambi		150.000	APBD			150.000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				- Penyusunan kajian penanganan wilayah pantai di perairan pelabuhan pengumpul regional.								
				- Penyusunan UKL/UPL								
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpnan Regional		Provinsi Jambi		150.000	APBD			150.000
				- Koordinasi, sinkronisasi dan monitoring pelaksanaan perijinan penanganan wilayah perairan pelabuhan pengumpnan regional.								
2	15	03	1.16	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpnan Regional	Terpenuhinya Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpnan Regional	Provinsi Jambi	25%	300.000	APBD		30%	300.000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Provinsi Jambi		150.000	APBD			150.000
				- Survei, pendataan dan verifikasi persyaratan perijinan TUKS/TS yang menjadi kewenangan provinsi								
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional		Provinsi Jambi		150.000	APBD			150.000
				- Monitoring, pengendalian, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan perijinan TUKS /TS dalam kewenangan provinsi								
2	15	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN								

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	
2	15	04		Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi		Provinsi Jambi						
				-Penyediaan sarana dan Prasarana Bandar Udara/Lapangan Udara	Jumlah Fasilitas Bandar Udara yang Tersedia							
				-Pengelolaan Bandar Udara/Lapangan Udara	Jumlah Bandar Udara yang dikelola							
				-Pengawasan dan Fasilitas Penyelenggaraan Transportasi Udara di Provinsi Jambi							30%	120.000.000
				-Survey IKM dalam Penyelenggaraan Transportasi Udara di Provinsi Jambi							30%	100.000.000
				-Pengelohan Data Transportasi Udara di Provinsi Jambi							30%	34.520.000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
2	15	05		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN								
2	15	05	1,01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Tersedianya dokumen rencana induk perkeretaapian di Provinsi Jambi dan dokumen perencanaan turunannya	Provinsi Jambi	80%	1.090.000	APBD		80%	1.280.000
				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian		Provinsi Jambi		790.000	APBD			980.000
				- Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi Jambi								

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				- Penyusunan FS Pembangunan jalur kereta api lintas Sarolangun-Jambi				790.000	APBD			
				- Penyusunan FS Pembangunan jalur kereta api lintas Bungo-Bangko-Sarolangun								
				- Penyusunan trase pembangunan jalur kereta api lintas Sarolangun-Jambi								980.000
				Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian		Provinsi Jambi		300.000	APBD			300.000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
2	15	05	1,02	Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Terpenuhinya Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Provinsi Jambi	25%	400.000	APBD		25%	400.000
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				200.000	APBD			200.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah				200.000	APBD			200.000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
2	15	05	1,03	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terwujudnya Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Jambi	25%	450.000	APBD		25%	450.000
				Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Kewenangan Provinsi				250.000	APBD			250.000
				Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Kewenangan Provinsi				200.000	APBD			200.000
2	15	05	1,04	Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Terwujudnya Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Jambi	25%	200.000	APBD		25%	200.000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	
				Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi			25%	200.000	APBD		25%	200.000
2	15	05	1,05	Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terwujudnya Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Provinsi Jambi	25%	450.000	APBD		25%	450.000
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				250.000	APBD			250.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi				200.000	APBD			200.000
2	15	05	1,06	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Terpenuhinya Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan	Provinsi Jambi	25%	450.000	APBD		25%	450.000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	
					Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							
				Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi				250.000	APBD			250.000
				Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi				200.000	APBD			200.000
2	15	05	1,07	Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terwujudnya Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Provinsi Jambi	25%	450.000	APBD		25%	450.000
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				250.000	APBD			250.000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024 (X1000)			CAPAIAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (X1.000)	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi				200.000	APBD			200.000
JUMLAH DANA								68.289.759				71.967.059

KEPALA DINAS

Drs. JOHN EKA POWA, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19681220 1998101001